

DR. H. SUPARDIN, M.H.I.



FIKIH & MAWARIS HUKUM KEWARISAN

Studi Analisis Perbandingan

DR. H. SUPARDIN, M.H.I.

FIKIH MAWARIS & HUKUM KEWARISAN

(Studi Analisis Perbandingan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruhnya isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Judul Buku

**Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan
(Studi Analisis Perbandingan)**

Penulis

Dr. H. Supardin, M.H.I.

Cet. Ke-1 : 2020

x + 122 halaman, 14 cm x 21 cm

ISBN : 978-623-226-160-0



Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

Percetakan: CV Berkah Utami

Jalan Sultan Alauddin No. 121 Permatasari Makassar

SAMBUTAN DEKAN

Al-hamdulillah, sebagai dekan menyambut baik atas terbitnya buku yang berjudul "Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)" oleh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang merupakan acuan para dosen dan mahasiswa dalam memahami dan mempelajari materi tersebut, terutama perbedaan antara fikih mawaris dan hukum kewarisan di Indonesia. Khusus hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam adalah formulasi dari KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Adanya buku ini, diharapkan proses pembelajaran dapat terarah dan mahasiswa dapat memahami materi yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan melalui buku teks, internet, penelitian, dan lain-lain. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat pencari keadilan tentang kewarisan. Saya apresiasi kepada penulis dengan menerbitkan buku ini. Atas segala dukungan sehingga terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Desember 2018 M

14 Rabiul Akhir 1440 H

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 196210161999031003

PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين و على اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Demikian pula şalawat dan taslim disampaikan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang merupakan *uswah al-ḥasanah* dalam berbagai aktifitas keseharian.

Penyelesaian buku ini, tentunya penulis menyadari bahwa untuk memperoleh hasil yang memuaskan bagi segenap pihak adalah tidak mudah, dan pasti mengalami kekeliruan yang tentunya tidak sengaja. Namun dengan dukungan moril dan materil dari berbagai pihak, buku ini dapat diterbitkan dengan baik.

Kepada mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar serta mahasiswa pada perguruan tinggi lain yang sedang mengambil mata kuliah Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan, dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan kemudahan memahami sistem pembagian warisan terutama dalam sistem pembagian Hukum Kewarisan bagi umat Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung terbitnya buku ini, permohonan maaf jika terdapat kekeliruan baik dari teknik pengutipan, penulisan, isi, dan sebagainya. Semoga Allah swt. memberikan manfaat dan pahala kepada penulis dan pembaca, *āmīn yā Rabb al-'ālamīn*.

Makassar, 17 Desember 2018 M
9 Rabiul Akhir 1440 H
Wa al-salām.

Penulis,

Dr. H. Supardin, M.H.I.

DAFTAR TRANSLITERASI

Adapun pedoman transliterasi yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. Huruf/Abjad

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrop
ي	ya	y	ye

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN.....	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Definisi Operasional	4
C. Tulisan yang Bertalian dengan Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam...	6
D. Tinjauan Teoretis	14
E. Metodologi	19
F. Tujuan dan Kegunaan	22
BAB II PENGGOLONGAN AHLI WARIS	25
A. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Fikih Mawaris	25
B. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam	47
C. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut KUHPerdara	56
BAB III PEMBAGIAN HARTA WARISAN	61
A. Pengertian	62
B. Masalah Gono-gini	64
C. Bagian Ayah	66
D. Bagian Kakek jika Bersama Saudara Pewaris	70

E. Sistem Munāsakhah dan Ahli Waris	
Pengganti (Plaatsvervulling)	75
F. Pewaris tidak Mempunyai Ahli Waris ...	79
G. Hamil/ Anak Lahir di Luar Nikah	80
H. Anak yang Lahir Akibat Hubungan Zina	
Versi Yurisprudensi	89
I. Anak dalam Kandungan	90
J. Aul dan Rad	91
K. Tugas-tugas Lain Ahli Waris	92
L. Wasiat	92
M. Hibah	109
N. Kesepakatan Ahli Waris	111
BAB IVPENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Implikasi	115
DAFTAR PUSTAKA	117
BIODATA PENULIS	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat adalah bangsa yang mempunyai hukum perundang-undangan dalam mengatur dan menata bangsa dan masyarakatnya, kendatipun masyarakatnya yang heterogen, baik suku, ras, adat-istiadat, maupun agamanya.

Bangsa Indonesia yang mempunyai dan mengakui agama dan keyakinan yang bermacam-macam, diakui oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29.¹ Artinya konstitusi memberikan kebebasan dalam menjalankan agamanya termasuk dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Umat yang melaksanakan tentunya masyarakat muslim dalam

¹Pasal ini tidak diamandemen: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengatur mengenai kedudukan penduduk, juga mengenai warganegara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Khusus ayat (1) menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (lihat penjelasannya).

menyelesaikan sengketa kewarisannya. Umat beragama di Indonesia tidak bisa menghindar dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai terutama dalam hukum kewarisan Islam. Pengetahuan hukum pun tidak dapat diabaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran hukum. Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia lahir dijemput oleh hukum, manusia hidup diatur oleh hukum, dan manusia mati diantar oleh hukum. Oleh karena itu, manusia perlu mempelajari sejarah sosial hukum, baik hukum publik maupun hukum privat terutama sejarah sosial hukum Islam di Indonesia, dan terkhusus hukum kewarisan Islam.

Istilah hukum Islam yang dimaksudkan adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum *amali* berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam).² Segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni (*mahdah*) tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Namun demikian, perkembangan hukum Islam di Indonesia termasuk di dalamnya hukum perkara tertentu

²Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53. Akan tetapi persoalan ini sudah dijadikan sebagai suatu konsep untuk menerapkan dalam Lembaga Peradilan Agama yakni Pengadilan Khusus menyangkut sengketa perdata tertentu termasuk hukum pidana tertentu.

yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama yang tidak menutup kemungkinannya untuk dimasukkan perkara pidana tertentu. Perkara pidana tertentu atau pidana khusus adalah awal dari perkara tertentu yang tidak menghasilkan kesepakatan para pencari keadilan, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian perkara hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dasar hukum fikih mawaris jelas tersurat dalam QS al-Nisa'/4: 7, 11, 12, dan 176. Sedangkan dasar hukum dari hukum kewarisan Islam adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan 44 pasal, terdapat dalam buku II pasal 171 sampai dengan pasal 214

Pembahasan dalam buku ini, adalah mencakup tentang studi analisis pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan dengan undang-undang dan penerapannya dalam masyarakat muslim di Indonesia. Untuk lebih mengfokuskan substansi masalah, maka dapat dilihat pada rumusan masalah berikut ini. Untuk menganalisis lebih rinci pembahasan buku ini, penulis merumuskan kajian pada: sistem penggolongan ahli waris menurut fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam; serta sistem pelaksanaan pembagian harta warisan

dalam masyarakat muslim berdasarkan fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Buku ini berjudul: "Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)." Studi analisis perbandingan yang dimaksudkan adalah Fikih Mawaris, KHI, dan KUHPerdota. Pengertian variabel yang mendasar yaitu, fikih mawaris, KHI, dan KUHPerdota. Secara umum dijelaskan bahwa judul tersebut memberi pengertian tentang gambaran pengembangan hukum Islam terutama materi hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia, terkhusus hukum kewarisan Islam.

Fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam mempunyai perbedaan terutama menyangkut gono-gini, bagian ayah, bagian kakek jika bersama dengan saudaranya pewaris yang disebut *al-jaddu wa al-ikhwah*, ahli waris pengganti, pewaris tidak mempunyai ahli waris, hamil/anak lahir di luar nikah, anak dalam kandungan, wasiat, dan kesepakatan ahli waris.

Fikih mawaris yang dimaksudkan adalah segala aspek yang terkait dengan pembagian waris adalah berdasar dari buku fikih klasik sebagai hasil dari ijtihad ulama fikih tentunya berdasar pada al-Qur'an dan hadis. Hukum kewarisan Islam yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing terhadap ahli waris yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Hukum kewarisan Islam di Indonesia selalu berpedoman pada KHI.

KUHPerdata (KUHPer) merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bahasa Belanda di sebut BW (*Burgerlijk Wetboek*).

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam

bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ketiga istilah ini menitikberatkan pada tiga unsur pokok, yakni ilmu tentang cara memindahkan hak dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak, dan menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut. Pembahasan ini lebih mengutamakan tentang gono-gini, bagian ayah, bagian kakek, ahli waris pengganti, dan bagian anak dalam kandungan.

C. Tulisan yang Bertalian dengan Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan

Setelah penulis menelusuri dan membaca berbagai buku pustaka, dan berkonsultasi dengan pihak akademik dan beberapa praktisi, penulis tidak menjumpai pembahasan tentang “studi analisis perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia”.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang oleh pembaru hukum Islam perlu direaktualisasikan.

Secara sederhana, pengertian reaktualisasi adalah proses, cara, dan atau perbuatan mengaktualisasikan kembali atau penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat.³ Artinya, bagaimana mengaktualkan nilai-nilai perikehidupan masyarakat berdasarkan perkembangan zaman. Karena perubahan dari zaman ke zaman itu selalu tidak sama atau tidak sesuai lagi untuk kehidupan masyarakat yang baru. Jadi reaktualisasi ini merupakan perubahan pola pikir masyarakat yang akurat yang sifatnya selain tekstual juga kontekstual. Tetapi reaktualisasi tersebut lebih condong pada pemahaman yang kontekstual.

Karena itu, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Dalam pengertian hukum kewarisan tersebut ada tiga inti yang merupakan syarat mutlak, yaitu adanya ilmu tentang kewarisan, adanya harta warisan, dan adanya pewaris

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar BahasaIndonesia*, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 936.

⁴Republik Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Buku II, Bab I, pasal 171.

dan ahli waris yang tidak terhalang oleh hukum yang berlaku.

Gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadzali, bermula ketika ia melihat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan di luar teks ayat-ayat al-Qur'an. Gagasan ini dilemparkan kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan dan forum resmi sejak tahun 1985, sehingga mendapat reaksi pro-kontra yang cukup keras dan tegas, terutama dari kalangan ulama.

Munawir dan pembaru lainnya diingatkan agar dalam menguraikan gagasan tentang reaktualisasi jangan gegabah, terutama yang menyangkut kepastian hukum, misalnya kasus kewarisan 2:1 (dua banding satu) dijadikan 1:1 (satu banding satu). Gagasan inilah yang menggemparkan dalam berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi, termasuk masyarakat secara luas yang mempunyai kepekaan terhadap hukum Islam. Sistem pembagian harta warisan 2 : 1 pada QS. al-Nisa/4: 11 adalah:

⁴ ... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ ... ⁵

⁵Terjemahnya: ...bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.... Penafsiran ayat tersebut adalah bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lihat Departemen

“bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan” (bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian perempuan). Ketentuan tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, masyarakat yang daerahnya terkenal kuat Islamnya atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan inilah yang ditertibkan oleh al-Qur’an, sehingga masyarakat tidak semaunya bertindak.

Sistem pembagian warisan pada masyarakat ini diketahui setelah ia menjadi Menteri Agama atas laporan para hakim. Kasus-kasus kewarisan di Pengadilan Agama, para hakim memberi fatwa kepada para ahli waris dengan ketentuan hukum faraid, pembagiannya 2:1. Akan tetapi para ahli waris yang muslim tersebut lebih memilih Pengadilan Negeri untuk meminta agar diberlakukan sistem pembagian yang rata. Dengan demikian fatwa hakim agama tersebut diabaikan walaupun fatwa yang dilontarkan oleh hakim itu bersumber dari teks ayat al-Qur’an.

Suatu hal yang mendapat perhatian khusus, bahwa orang yang enggan menerima fatwa hakim agama (Pengadilan Agama) dan lebih memilih Pengadilan Negeri tersebut tidak hanya orang awam, melainkan orang yang cukup menguasai ilmu keislaman, termasuk

Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Edisi baru revisi terjemah (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 116.

tokoh-tokoh organisasi Islam.⁶ Mayoritas dari mereka menghendaki pembagian secara merata, karena hal itulah yang mereka anggap lebih bersifat adil.

Menurut Satria Effendi M. Zein, gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang beliau lontarkan memang sempat membuat para ulama dan peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Karena gagasan tersebut merupakan prinsip dalam keyakinan umat Islam. Oleh karenanya, para pencinta hukum Islam harus mengkaji secara serius masalah fikih dan usul fikih sebagai metodologinya,⁷ termasuk pembagian warisan yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan.

Dalam masalah warisan, Munawir Sjadzali mempunyai pengalaman pribadi. Sebelum ia melaksanakan gagasannya, terlebih dahulu meminta nasihat ulama terkemuka. Walaupun tidak mendapat jawaban yang pasti dari ulama tersebut, namun ulama itu memberitahukan apa yang ia alami sendiri. Mendengar jawaban tersebut, ia termenung sebentar, lalu bertanya: “apakah dari segi keyakinan Islam

⁶Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 88.

⁷Satria Effendi M. Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 292.

kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya”.⁸ Menurut Munawir Sjadzali, membagi rata harta kekayaan kepada putra dan putri selagi masih hidup dianggap sebagai hibah, dan mempunyai keraguan akan keadilan hukum faraid (hukum kewarisan) di kemudian hari. Sebab kalau seseorang mempunyai keyakinan akan adanya keadilan dalam hukum kewarisan, tidak perlu dilakukan pembagian sebagai hibah. Tetapi kenyataan yang dialaminya adalah sebagai bukti, bahwa sudah banyak masyarakat Islam melaksanakan pembagian harta kekayaan kepada kerabatnya yang dianggap sebagai hibah.

Menurut Jalaluddin Rahman, walaupun ayat mawaris sudah jelas 2:1, tetapi mengandung makna metaforis yakni pesan keadilan dan penghormatan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu perubahan dari 2:1 menjadi 1:1 adalah sebuah tuntutan keadilan gender dan persamaan. Pasti, urusan waris adalah urusan kehidupan dunia, sehingga sangat perlu diurus sebagai urusan dunia.⁹ Pendapat ini membenarkan adanya pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang sama, bahkan berbanding terbalik, tergantung konteks kasus yang ada.

⁸Munawir Sjadzali, h. 89.

⁹Jalaluddin Rahman, *Metodologi Pembaruan: Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam (Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru)*, Orasi Pengukuhan Guru Besar (Makassar: IAIN Alauddin, 2001), h. 37-38.

Penegasan di akhir tulisan Munawir Sjadzali mengatakan bahwa bukan berarti hukum kewarisan Islam seperti yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) itu tidak adil. Tetapi ia lebih menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum kewarisan Islam (ilmu faraid).

Alasan Munawir Sjadzali melaksanakan reaktualisasi dalam hukum kewarisan adalah adanya sejumlah masyarakat muslim yang telah membagi hartanya kepada anak-anaknya ketika ia masih sehat, karena adanya kekhawatiran ketidakadilan dalam pembagian pusaka berdasarkan ilmu faraid. Ketentuan pembagian harta warisan dalam QS. al-Nisa ayat 11 tersebut telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia.

Dasar yang menjadi rujukan Munawir Sjadzali mengadakan reaktualisasi hukum kewarisan Islam ialah Khalifah Umar bin Khattab. Untuk pertama kali dalam sejarah Islam, pembaruan hukum dilaksanakan yakni pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi Khalifah, beliau banyak mengadakan pembaruan hukum termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Umar telah banyak mengambil kebijakan dalam hukum yang tidak sesuai dengan teks ayat-ayat al-Qur'an.

Mengenai hal tersebut, kasus yang paling menggemparkan para sahabat adalah kebijaksanaan dalam pembagian harta rampasan perang yang tidak

sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.¹⁰ Kebijaksanaan itu mendapat reaksi oleh banyak sahabat Nabi seperti Bilal, Abdul Rahman ibn 'Auf, Zubair ibn 'Awam, mereka menuduh Umar meninggalkan al-Qur'an. Akan tetapi selain banyak yang menentang Umar, juga ada yang mendukung kebijakannya, seperti Khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.¹¹ Pembaruan ini merupakan reaktualisasi hukum pertama dalam sejarah perkembangan hukum Islam di dunia, karena Umar mengambil keputusan berdasarkan ijtihad sendiri yang tidak sama dengan kebiasaan umat Islam.

Kebijakan Umar inilah yang dijadikan dasar oleh Munawir Sjadzali untuk mengadakan reaktualisasi hukum Islam, seperti hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, tidaklah salah jika seseorang mengadakan pembaruan hukum Islam, tidak mengikuti teks ayat al-Qur'an, karena atas pertimbangan kemaslahatan umat yang menghendaki demikian. Hal itu juga berdasarkan kemajuan dan perkembangan zaman, sehingga tidaklah heran kalau masyarakat muslim tidak melaksanakan hukum kewarisan Islam dengan sistem 2:1. Mereka melaksanakan pembagian harta warisan dengan sistem 1:1, bahkan berbanding terbalik 1:2, artinya laki-laki

¹⁰Lihat QS al-Anfal (8): 41 yang artinya "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnussabil..."

¹¹Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 95.

mendapat satu bagian, dan perempuan mendapat dua bagian.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia belum terlalu bermasyarakat dalam implementasinya, sebab penerapannya setelah adanya kasus/perkara di Pengadilan Agama. Sesungguhnya bila masyarakat Islam telah memahami apa hikmah di dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam itu maka penerapannya akan terwujud dan perpecahan/perkara di pengadilan akan diminimalisasi.

D. Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis ini merupakan rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif untuk menghasilkan konsep atau proposisi (rancangan usulan) baru dalam buku ini yang disertai dengan ilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tempat dan derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam QS al- Mujādilah/58: 11

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوْا
يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَالَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

Ayat ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada Alla swt. dan ilmu pengetahuan.

Adanya pengetahuan yang dimilikinya, peneliti dalam melaksanakan tugasnya akan menghasilkan karya yang berkualitas. Kajian ini membahas mengenai pembagian harta warisan versi fikih mawaris dan hukum kewarisan yang mempunyai landasan khusus pada QS al-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176. Demikian pula Allah membedakan antara orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui pastilah ia berakal, dan orang yang berakal akan menerima suatu

¹²Khadim al-Haramain asy-Syarifainal-Sa'ud, (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asysyarif Kompleck Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1418 H) h. 910-911.

pelajaran, sebagaimana firman-Nya dalam QS al-Zumar/39: 9

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰؤُا
الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

... Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.¹³

Kaitannya dengan kewarisan, diperlukan sebuah teori untuk mendapatkan kajian teori ilmiah yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat menerangkan kepada umat manusia dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nahl/16: 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan kepadamu al- Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

¹³*Ibid.*, h. 747.

telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.¹⁴

Ayat tersebut menerangkan kepada umat manusia yang dimaksudkan adalah: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al-Qur'an, termasuk dalam hukum dan perundang-undangan. Perundang-undangan sebagai bagian dari hukum Islam yang merupakan bagian materi pada lembaga Peradilan Agama, mengalami rekonstruksi dalam pengembannya.

Sebuah konstruksi teoretis, teori hukum telah mengoperasikan dan menghadirkan sebuah substruktur yang secara keseluruhan terkait oleh proposisi perintah suci yang bersumber dari wahyu. Proposisi ini tidak dapat diubah dan tidak ada interpretasi atau manipulasi intelektual yang dapat mengubah pokok-pokok yang mendasari atau dugaan yang dapat mempengaruhi substansinya. Teori ini disebut sebagai kesinambungan teoretis atau teori kesinambungan.¹⁵

Teori kesinambungan ini tidak akan berubah, sekalipun situasi dan kondisi menginginkan untuk berubah, teori ini tetap konstan, karena ia merupakan proposisi perintah wahyu. Berdasar dari teori kesinambungan ini, maka kerangka teoretis dalam buku ini dikembangkan ke dalam tiga teori, yakni: teori

¹⁴Lihat al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 16.

¹⁵Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo, 200. h. 185.

pemberlakuan hukum; teori eklektisitas (*eclecticism*); dan teori unifikasi (*unification*) hukum.

Teori pemberlakuan hukum sebagai hukum nasional, telah dilalui beberapa teori yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori yang dimaksudkan antara lain adalah: teori *syahadat/kredo*, teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, teori *receptio a contrario*, dan teori *eksistensi*.

Menurut Friederich Julius dan Hazairin Tahir Azhary dalam teorinya yang bernama “teori lingkaran konsentris” mengemukakan bahwa betapa eratnya hubungan antara agama, hukum, dan negara.¹⁶ Teori ini menghendaki agama, hukum, dan negara tidak dapat dipisahkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar negara yakni Pancasila.

Hukum nasional yang berdasar Pancasila berlaku hukum agama dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni menyangkut keyakinan agama, ibadah agama, dan hukum agama.

Hukum agama adalah sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap hukum nasional.

¹⁶Ichtijanto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994), h. 258.

Hukum agama (hukum Islam) dan hukum nasional mempunyai hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi yang paling tampak adalah bahwa hukum Islam telah lama ada dalam hukum nasional (masuk dalam teori *eksistensi*).

Teori *eksistensi*, Mempunyai arti bahwa eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional meliputi, adanya dalam arti:

1. hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya;
2. adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional;
3. norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
4. sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Teori eksistensi inilah yang bertahan dan berlaku sejak adanya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam pembagian harta warisan bagi umat Islam di Indonesia yang kini sebagai kompetensi absolut pada lembaga Peradilan Agama.

E. Metodologi

Metode yang digunakan oleh penulis dalam buku ini sebagai berikut:

1. Metode Penulisan

Dalam metode ini, penulis melaksanakan buku dengan menggunakan metode komparatif yakni dengan membandingkan beberapa pendapat dari berbagai literatur yang berkenaan dengan objek buku. Objek buku yang dimaksudkan adalah perkembangan pengembangan materi hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum kewarisan Islam.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan multi interdisipliner. Metode pendekatan ini bersifat normatif sosiologis, formal yuridis, dan konteks sejarah konstitusional. Pendekatan yang bersifat normatif sosiologis adalah bagian dari hukum Islam yang pengembangan dan pelaksanaannya tergantung kesadaran masyarakat, karena hanya mempunyai sanksi moral bila melanggar. Pendekatan yang bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum Islam yang telah menjadi hukum positif atas dasar peraturan yang telah mendapat legitimasi hukum atau telah diundangkan. Adapun pendekatan dalam konteks sejarah konstitusional, adalah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui perjuangan legal sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat.

3. Metode Penulisan

Untuk mengumpulkan data dalam buku ini, penulis menggunakan buku kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan objek buku. Literatur primer yang digunakan oleh penulis adalah: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama (diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989); 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991); dan 3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama (diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006). Literatur sekunder dan atau penunjang adalah buku-buku hukum terutama yang menyangkut perkembangan dan pengembangan materi hukum kewarisan Islam di Indonesia.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Dalam teknik analisis data untuk memperoleh kualifikasinya, penulis juga menggunakan teknik interpretasi dengan cara berfikir deduktif dan terkadang menggunakan induktif. Metode ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis data, terutama pendapat tentang

pengembangan materi hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam menganalisis data terkadang penulis mendahulukan metode deduktif daripada metode induktif, demikian juga sebaliknya, tergantung objek pembahasan. Kalau objek pembahasan mengarah kepada kekhususan maka penulis menggunakan metode induktif, dan kalau objeknya mengarah kepada keumuman maka yang digunakan metode deduktif (metode induktif bersumber dari khusus ke umum, dan metode deduktif dari umum ke khusus).

F. Tujuan dan Kegunaan

Dalam meneliti sesuatu objek, perlu diketahui apa tujuan dan kegunaannya, sehingga buku ini terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan sebagaimana mestinya, terkhusus bagi peneliti dalam mengkaji buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dengannya. Adapun tujuan dan kegunaan dalam buku ini adalah:

1. Tujuan

Buku ini bertujuan untuk menelusuri dan mengetahui bagaimana sistem penggolongan ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia. Penggolongan dan sistem penyelesaian yang dimaksudkan adalah berdasarkan fikih mawaris, hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam kewarisan berdasarkan KUHPerdota. Demikian pula bertujuan untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim berdasarkan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan teoritis dalam buku ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bergelut di dunia akademik, juga berguna menjadi bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Selain itu juga kegunaan secara praktis yakni diharapkan agar bermanfaat bagi masyarakat luas yang senantiasa belajar dan mencari materi hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam untuk dikembangkan dalam masyarakat di Indonesia. Kegunaan secara spesifik, buku ini dapat berguna sebagai bahan rujukan pada buku selanjutnya serta berguna untuk pengembangan materi hukum Islam terkhusus hukum kewarisan Islam pada jurusan yang bergelut dalam dunia hukum Islam di Indonesia.

Fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, terkhusus Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan, atau prodi dan/atau jurusan yang senada dengan prodi/jurusan tersebut, perlu dibedakan termasuk dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Karenanya buku ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk dapat

membedakan sistem pembagian warisan termasuk penggolongan/pengelompokan menurut fikih mawaris serta sistem pembagian warisan dan penggolongan atau pengelompokan menurut hukum kewarisan Islam yang dikenal dengan rujukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berdasarkan penggolongan KUHPerdara di Indonesia.

BAB II

PENGGOLONGAN AHLI WARIS

A. *Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Fikih Mawaris*

Penggolongan ahli waris dalam fikih mawaris meliputi: golongan ahli waris laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta kelompok atau golongan ahli waris dalam menerima harta warisan dari pewaris. Sistem dalam penggolongan ahli waris versi fikih mawaris ini adalah kelompok ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah* termasuk dalam sistem *hajib mahjub*-nya. Penggolongan ahli waris laki-laki dalam fikih mawaris adalah:

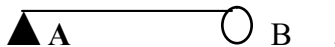
1. Suami/ duda (*al-zauju*).
2. Anak laki-laki (*al-ibnu*).
3. Ayah (*al-abu*)
4. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (*ibnu al-ibni*).
5. Kakek *ṣaḥīḥ* yaitu ayah dari ayah (*al-jaddu*).
6. Saudara laki-laki sekandung (*al-akhu li al-abi*).
7. Saudara laki-laki seayah (*al-akhu li al-abi*).
8. Saudara laki-laki seibu (*al-akhu li al-ummi*).
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*ibnu al-akhi al-syaqīqu*).
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (*ibnu al-akhi li al-abi*).

11. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah (*al-ammu al-syaqīqu*).
12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (*al-ammu li al-abi*).
13. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (*ibnu al-ammi al-syaqīqu*).
14. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (*ibnu al-ammi li al-abi*).

Penggolongan ahli waris yang meliputi 14 golongan dari ahli waris laki-laki tersebut, jika semuanya ada maka yang mendapat harta warisan dari pewaris atau yang tidak terhalang, hanya 3 golongan saja, yaitu: duda/suami, anak laki-laki, dan ayah. Ketiga macam kelompok/golongan dari jenis laki-laki tersebut tidak pernah terhalang apabila tidak pernah terlibat dalam memfitnah apalagi membunuh si pewaris, tidak dalam keadaan murtad, dan tidak dalam keadaan sebagai budak si pewaris.

Golongan dari ahli waris laki-laki tersebut dapat dilihat dan diketahui secara mudah apabila dilihat gambar atau skema berikut ini:

1. Suami/duda (*al-zauju*).



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal (pewaris)

○ = laki-laki yang hidup (ahli waris)

A = istri (pewaris)

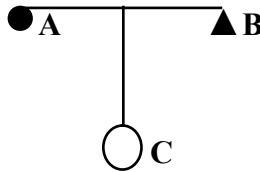
B = suami/duda (ahli waris)

Apabila terjadi kasus seperti ini, ahli warisnya hanya satu yakni suami (duda), maka duda mendapat satu per dua (seperdua) sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā'/4: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ...﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....”

2. Anak laki-laki (*al-ibnu*).



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal (pewaris).

● = laki-laki yang meninggal.

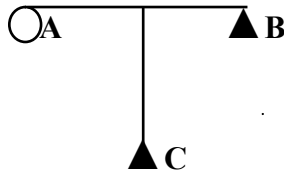
○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = pewaris.

B = istri (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = anak laki-laki (ahli waris).

3. Ayah (*al-abu*).



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal.

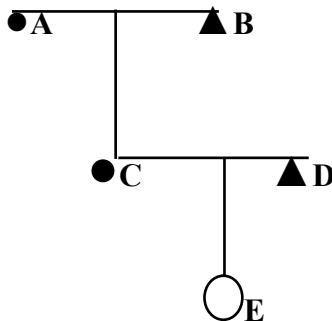
○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = ayah (ahli waris).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = perempuan yang meninggal (pewaris).

4. Cucu laki-laki dari pancar laki-laki (*ibnu al-ibni*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

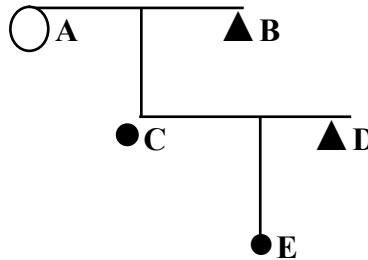
▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = pewaris.

- B = istri (ahli waris tapi sudah meninggal).
 C = anak laki-laki (ahli waris tapi sudah meninggal).
 D = menantu perempuan (bukan ahli waris dan sudah meninggal).
 E = cucu laki-laki (ahli waris).

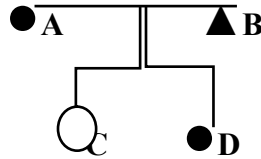
5. Kakek *ṣaḥiḥ* yaitu ayah dari ayah (*al-jaddu*).



Keterangan status:

- = laki-laki yang meninggal.
- ▲ = perempuan yang meninggal.
- = laki-laki yang hidup (ahli waris).
- A = kakek *ṣaḥiḥ* (ahli waris).
- B = nenek *ṣaḥiḥ* (ahli waris tapi sudah meninggal).
- C = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).
- D = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).
- E = pewaris.

6. Saudara laki-laki sekandung (*al-akhu li al-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

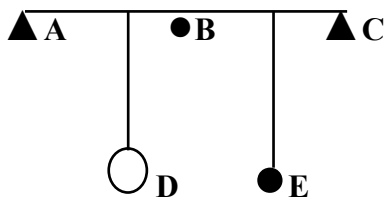
A = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = saudara laki-laki sekandung (ahli waris).

D = pewaris.

7. Saudara laki-laki seayah (*al-akhu li al-abi*).



Keterangan status:

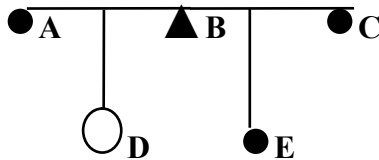
● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup

- A = ibu tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).
 B = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).
 C = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
 D = saudara laki-laki seayah (ahli waris)
 E = pewaris.

8. Saudara laki-laki seibu (*al-akhu li all-ummi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup

A = ayah tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

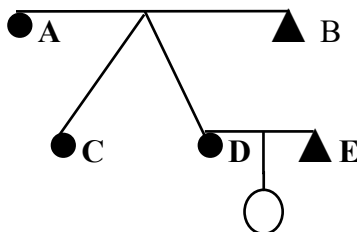
B = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

D = saudara laki-laki seibu (ahli waris)

E = pewaris.

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*ibnu al-akhi al-syaqīqu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup

A = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

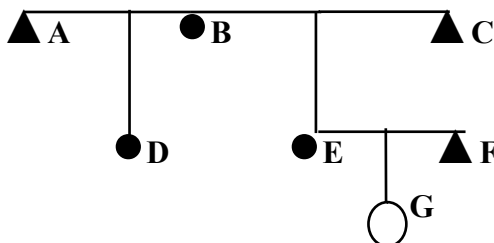
C = pewaris.

D = saudara laki-laki sekandung (ahli waris tapi sudah meninggal).

E = ipar.

F = ahli waris.

10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (*ibnu al-akhi li al-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = ibu tiri (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

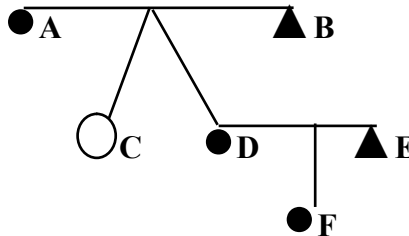
D = pewaris.

E = saudara laki-laki seayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

F = ipar.

G = ahli waris.

11. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah (*al-ammu al-syaqīqu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

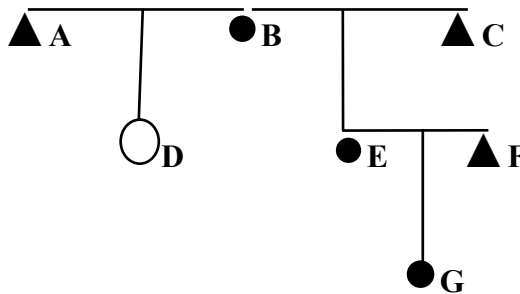
C = paman sekandung (ahli waris).

D = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

E = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

F = pewaris

12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah (*al-ammu li al-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

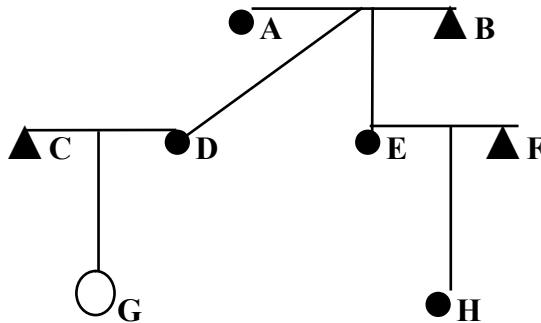
○ = laki-laki yang hidup.

A = nenek menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

B = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

- C = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).
 D = paman seayah (ahli waris).
 E = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
 F = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
 G = pewaris.

13. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman sekandung (*ibnu al-ammi al-syaqīqu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

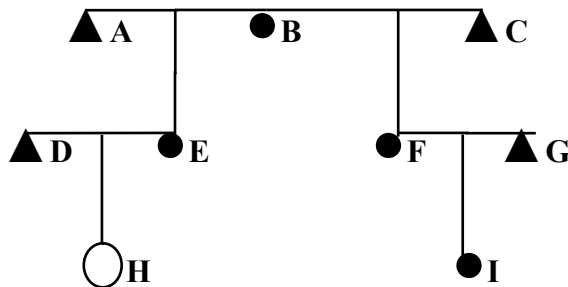
○ = laki-laki yang hidup.

A = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).

- C = tante/istri paman (bukan ahli waris dan sudah meninggal).
- D = paman sekandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
- E = ayah kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
- F = ibu kandung (ahli waris tapi sudah meninggal).
- G = sepupu kandung (ahli waris).

14. Sepupu (misan), yaitu anak laki-laki dari paman seayah (*ibnu al-ammi li al-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = nenek menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).

- B = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).
- C = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi sudah meninggal).
- D = tante menyamping (bukan ahli waris dan sudah meninggal).
- E = paman seayah (ahli waris tapi sudah meninggal).
- F = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).
- G = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).
- H = sepupu seayah (ahli waris).
- I = pewaris.

Penggolongan ahli waris dari pihak perempuan menurut fikih mawaris adalah terdiri atas:

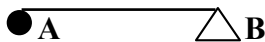
1. Istri/janda (*al-zaujah*).
2. Anak perempuan (*al-bintu*).
3. Ibu (*al-ummu*).
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (*bintu al-ibni*).
5. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek ṣaḥiḥ (*al-jaddatu min jihatil-ummi*).
6. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah (*al-jaddatu min jihatil-abi*).
7. Saudara perempuan sekandung (*al-ukhtu al-syaqīqatu*).
8. Saudara perempuan seayah (*al-ukhtu li al-abi*).
9. Saudara perempuan dari ibu (*al-ukhtu-lil-ummi*).

Apabila golongan dari jalur perempuan yang terdiri dari sembilan kelompok ahli waris perempuan tersebut semuanya ada, artinya ahli waris yang hanya golongan perempuan tersebut maka yang mendapatkan harta warisan hanya 5 orang yaitu:

1. Istri/janda (*al-zaujah*).
2. Anak perempuan (*al-bintu*).
3. Ibu (*al-ummu*).
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (*bintu al-ibni*).
5. Saudara perempuan sekandung (*al-ukhtu al-syaqīqatu*).

Penggolongan dari ahli waris perempuan tersebut dapat dilihat dan diketahui secara mudah apabila dilihat gambar atau skema berikut ini:

1. Istri/janda (*al-zaujah*).



Keterangan status:

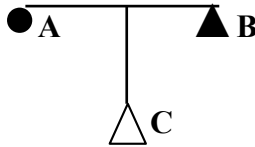
● = laki-laki yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = suami (pewaris).

B = istri/janda (ahli waris).

2. Anak perempuan (*al-bintu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal

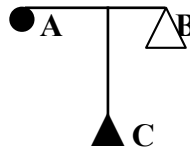
△ = perempuan yang hidup.

A = pewaris.

B = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = anak perempuan (ahli waris).

3. Ibu (*al-ummu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal

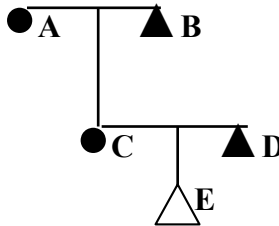
△ = perempuan yang hidup.

A = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ibu (ahli waris).

C = pewaris.

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau pancar laki-laki (*bintu al-ibni*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = pewaris.

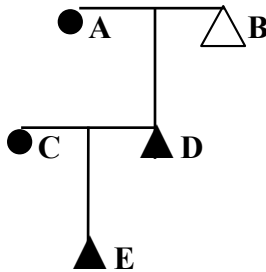
B = istri/janda (ahli waris tapi telah meninggal).

C = anak laki-laki (ahli waris tapi telah meninggal).

D = menantu perempuan (bukan ahli waris dan telah meninggal).

E = cucu perempuan (ahli waris).

5. Nenek dari pancar ibu, yaitu ibunya ibu atau nenek *ṣaḥīh* (*al-jaddatu min jihatil-ummi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

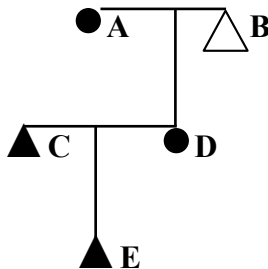
B = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris).

C = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

D = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E = pewaris.

6. Nenek dari pancar ayah, yaitu ibunya ayah (*al-jaddatu min jihatil-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = kakek sah (ahli waris tapi telah meninggal).

B = nenek sah (ahli waris).

C = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

D = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

E = pewaris.

7. Saudara perempuan sekandung (*al-ukhtu al-syaqīqatu*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

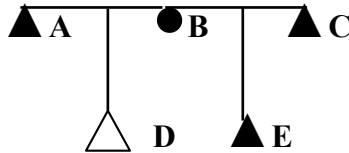
A = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

B = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

C = saudara perempuan sekandung (ahli waris).

D = pewaris.

8. Saudara perempuan seayah (*al-ukhtu li al-abi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = ibu tiri (bukan ahli waris dan telah meninggal).

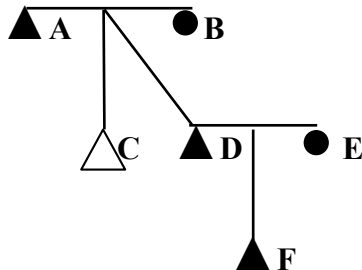
B = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

C = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

D = saudara perempuan seayah (ahli waris).

E = pewaris.

9. Saudara perempuan dari ibu (*al-ukhtu lil-ummi*).



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = nenek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

B = kakek ṣaḥiḥ (ahli waris tapi telah meninggal).

C = bibi/tante (ahli waris).

D = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

F = pewaris.

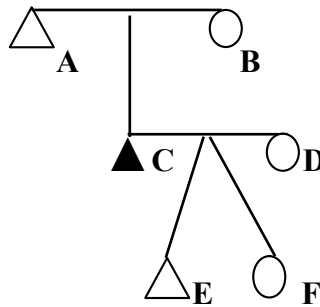
Apabila dari golongan laki-laki dan perempuan semuanya ada maka ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman (terhalang) adalah ahli waris:

1. Suami/duda (*al-zauju*) atau istri/janda (*al-zaujah*).
2. Ayah (*al-abu*).
3. Ibu (*al-ummu*).
4. Anak laki-laki (*al-ibnu*).
5. Anak perempuan (*al-bintu*).

Kelima macam golongan dari ahli waris tersebut tidak pernah terhalang (mahjub hirman) apabila mereka tidak termasuk dalam kategori merencanakan memfitnah apalagi membunuh si pewaris, murtad, dan/atau sebagai budak seperti yang telah disebutkan terdahulu. Untuk memudahkan penggolongannya semua ahli waris yang

tidak mahjub hirman tersebut dapat dilihat gambar berikut ini.

Pertama: pewaris adalah istri atau janda, gambarnya adalah:



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

○ = laki-laki yang hidup.

A = ibu (ahli waris).

B = ayah (ahli waris).

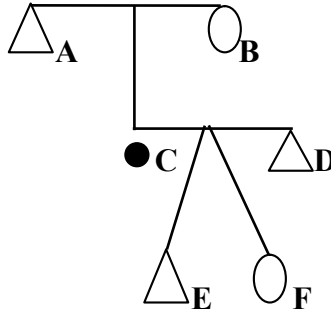
C = pewaris.

D = suami/duda (ahli waris).

E = anak perempuan (ahli waris).

F = anak laki-laki (ahli waris).

Kedua: pewaris adalah suami atau duda, gambarnya adalah:



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

○ = laki-laki yang hidup.

A = ibu (ahli waris).

B = ayah (ahli waris).

C = pewaris.

D = istri/janda (ahli waris).

E = anak perempuan (ahli waris).

F = anak laki-laki (ahli waris).

Penggabungan pengelompokan/penggolongan semua ahli waris baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, mereka yang mendapat harta warisan adalah duda atau janda, ayah, ibu, dan anak.

B. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam

Penggolongan atau pengelompokan ahli waris versi hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah ahli waris berdasarkan penggolongan yang terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penggolongan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kelompok ahli waris. Penggolongan atau kelompok ahli waris tersebut meliputi:¹

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda (suami) atau janda (istri).
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

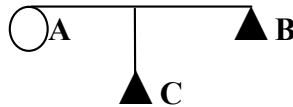
Penggolongan ahli waris versi hukum kewarisan Islam di Indonesia meliputi golongan laki-laki dan

¹Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 174.

golongan perempuan. Penggolongan ahli waris tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Pertama, hubungan darah dari golongan laki-laki yang terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

1. Ayah.



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal.

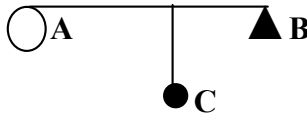
○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = ayah (ahli waris).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = perempuan yang meninggal (pewaris).

Atau gambar yang lain (pewarisnya adalah anak laki-laki) yakni:



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal.

● = laki-laki yang meninggal.

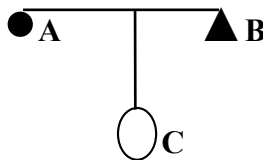
○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = ayah (ahli waris).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = pewaris.

2. Anak laki-laki.



Keterangan status:

▲ = perempuan yang meninggal (pewaris).

● = laki-laki yang meninggal.

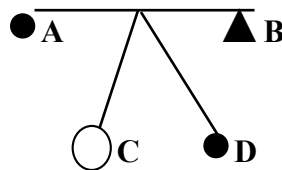
○ = laki-laki yang hidup (ahli waris).

A = pewaris.

B = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = anak laki-laki (ahli waris).

3. Saudara laki-laki.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

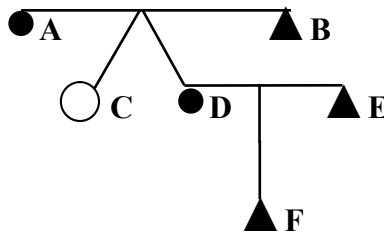
A = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = saudara laki-laki sekandung (ahli waris).

D = pewaris.

4. Paman.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = kakek (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = nenek (ahli waris tapi sudah meninggal).

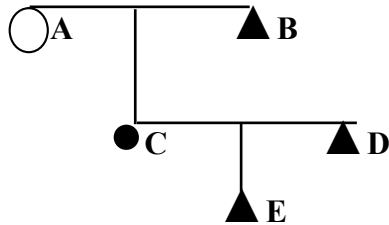
C = paman (ahli waris).

D = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

E = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

F = pewaris.

5. Kakek.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = kakek.

B = nenek.

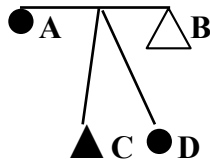
C = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

D = ibu (ahli waris tapi sudah meninggal).

E = pewaris.

Kedua, adalah hubungan darah dari golongan perempuan yang terdiri atas: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

1. Ibu.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal

△ = perempuan yang hidup.

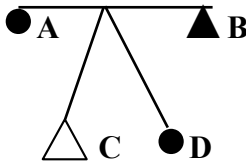
A = ayah (ahli waris tapi sudah meninggal).

B = ibu (ahli waris).

C = saudara perempuan (ahli waris tapi sudah meninggal).

D = pewaris.

2. Anak perempuan.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal

△ = perempuan yang hidup.

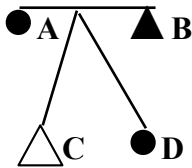
A = pewaris.

B = istri/janda (ahli waris tapi sudah meninggal).

C = anak perempuan (ahli waris).

D = anak laki-laki (ahli waris tapi sudah meninggal).

3. Saudara perempuan.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

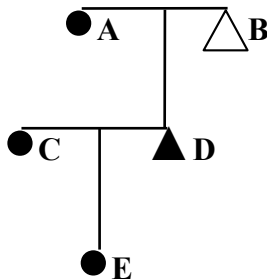
A = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

B = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

C = saudara perempuan.

D = pewaris.

4. Nenek.



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

▲ = perempuan yang meninggal.

△ = perempuan yang hidup.

A = kakek (ahli waris tapi telah meninggal).

B = nenek (ahli waris).

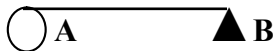
C = ayah (ahli waris tapi telah meninggal).

D = ibu (ahli waris tapi telah meninggal).

E = pewaris.

Ketiga, adalah golongan berdasarkan hubungan perkawinan yakni terdiri atas duda atau janda.

1. Ahli warisnya duda, gambarnya adalah:



Keterangan status:

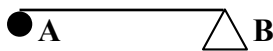
▲ = perempuan yang meninggal.

○ = laki-laki yang hidup.

A = suami/duda (ahli waris).

B = pewaris.

2. Ahli warisnya janda, gambarnya adalah:



Keterangan status:

● = laki-laki yang meninggal.

\triangle = perempuan yang hidup.

A = pewaris.

B = istri/janda (ahli waris).

Penggolongan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikenal dengan istilah kelompok-kelompok ahli waris. Kelompok atau golongan ahli waris yang dimaksudkan adalah: janda atau duda, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan paman. Apabila semua golongan ahli waris tersebut ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: janda atau duda, ayah, ibu, dan anak.

Dasar penggolongan atau pengelompokan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang biasa disingkat dengan KHI, khususnya pada pasal 171 sampai dengan pasal 214. Inpres ini dikeluarkan dan disahkan oleh Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991.

Penggolongan atau pengelompokan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah termaktub dalam pasal 174, yakni berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan.

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ahli waris ini tidak dapat *dimahjub* atau dihalangi untuk memperoleh harta warisan dari pewaris oleh ahli waris siapapun, kecuali jika mereka terbukti melanggar pasal 173 KHI, yakni: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

C. Sistem Penggolongan Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Kedudukan ahli waris menurut hukum perdata, terbagi atas empat golongan, yaitu:
Golongan I (pertama), meliputi:

- a. Anak-anak dan keturunannya (pasal 852 KUHPerdara).
- b. Suami atau istri/duda atau janda (pasal 852a KUHPerdara).

Golongan II (kedua), meliputi:

- a. Ayah dan ibu (pasal 854 KUHPerdara).
- b. Saudara-saudara dan keturunannya (pasal 854 KUHPerdara).

Golongan III (ketiga), meliputi:

- a. Kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu (pasal 853 KUHPerdara).
- b. Orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas (pasal 853 KUHPerdara).

Golongan IV (keempat), meliputi:

- a. Paman dan bibi beserta keturunannya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu (pasal 858 KUHPerdara).
- b. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris (pasal 858 KUHPerdara).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembagian harta warisan berkaitan dengan kedudukan dan penggolongan ahli waris tersebut ialah:

- a. Perbandingan bagian masing-masing ahli waris adalah satu berbanding satu (1:1) laki-laki maupun perempuan.
- b. Kalau tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta warisan diserahkan kepada negara.

- c. Golongan yang terdahulu meng-*hijab*/menghalangi golongan berikutnya. Artinya jika ada ahli waris golongan pertama (I), maka ahli waris golongan II, III, dan IV terhalang untuk menjadi ahli waris alias tidak mendapat harta warisan.
- d. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang mewarisi, golongan III dan IV tidak mewarisi. Tetapi golongan III dan IV mungkin dapat mewarisi bersama-sama kalau mereka berlainan garis keturunan.
- e. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
- f. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, juga tidak ada saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 859 KUHPerdara, warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama. Satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga yang sama dalam garis ibu (pasal 853 KUHPerdara).

Sebagai penjelasan: Apabila ahli waris golongan I dan II tidak ada, maka yang mewarisi ialah golongan III dan/atau golongan IV. Dalam hal kasus ini, harta warisan dibagi dua dan sama besarnya yang disebut dengan *kloving* (bahasa Belanda). Bagian tersebut ialah

setengah untuk keluarga garis keturunan ayah dan setengah atau seperdua untuk keluarga garis keturunan ibu. Kewarisan bilateral yang terjadi adalah bagian mereka sama, baik dari keturunan garis laki-laki maupun perempuan. Kekhususan dalam sistem pembagian harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPerdata adalah menyamakan bagian para ahli waris yang sederajat, baik laki-laki maupun perempuan.



BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Sistem pembagian harta warisan pada fikih mawaris, hukum kewarisan Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kewarisan versi KUHPerdota mempunyai perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang berlaku pada suatu negara termasuk Indonesia.

Fikih mawaris yang dimaksudkan adalah berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijtihad (buku-buku fikih/kitab *fiqh* mawaris). Sedangkan hukum kewarisan Islam dimaksudkan adalah pembagiannya dilaksanakan berdasarkan aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi orang Islam, serta KUHPerdota adalah kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang non muslim.

Berdasarkan sistem pembagian tersebut, berikut ini dapat dilihat beberapa perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan. Perbandingan antara fikih mawaris dan KHI dalam pembagian harta warisan Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Juga disinggung sekilas sistem kewarisan perdota.

Pembagian harta warisan dalam pembahasan ini terfokus pada perbedaannya yaitu: pengertian, gono-gini, bagian ayah, bagian kakek jika bersama dengan saudara si pewaris, jika si pewaris tidak mempunyai ahli waris, bagian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah/hamil di luar nikah, wasiat, hibah, dan kesepakatan

para ahli waris, serta bagian-bagian lain yang terkait dengan warisan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam KUHPerdata. Pembahasan ini didasarkan atas ilmu *farā'id* yang biasa disebut fikih mawaris dan KHI yang disebut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta KUHPerdata termasuk dalam sekilas kewarisan hukum adat. Oleh karena itu, berikut ini pembahasan berdasarkan perbedaan dari sistem penggolongan dan pembagian harta warisan tersebut.

A. Pengertian

1. Fikih Mawaris

Fikih mawaris biasa dijumpai dengan istilah ilmu *farā'id*, *fiqh mawāris*, fikih mawaris, dan hukum waris. Namun yang dipergunakan dalam istilah Indonesia adalah fikih mawaris, dan apabila ditransliterasikan dari bahasa Arab ke Indonesia maka penulisannya adalah *fiqh mawāris*.

Pengertian fikih mawaris adalah sebuah ilmu fikih yang berhubungan dengan pembagian harta warisan dan mengetahui tentang cara perhitungan dan dapat mengetahui bagian atau kadar yang wajib dari harta peninggalan si pewaris yang menjadi milik setiap ahli waris yang berhak menerima.

2. Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)¹ pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan berapa bagiannya masing-masing ahli waris tersebut.

¹Tirkah adalah harta bersih dari biaya penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa mengenai warisan ada empat hal yang penting diketahui yakni: mengenai harta, pemindahan hak pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan pula berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang berhak menerima.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik mati hakiki atau mati hukmi, mempunyai ahli waris yang ditinggalkan, dan juga memiliki harta warisan. Atau pengertian dalam KHI, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan/mempunyai ahli waris, dan memiliki harta warisan. Pewaris yang mati hakiki adalah seseorang meninggal dunia dan disaksikan oleh orang banyak, kematiannya tidak lagi dipermasalahkan karena dilihat langsung oleh pihak keluarga maupun kerabat lainnya. Adapun mati hukmi adalah seseorang dinyatakan meninggal dunia oleh putusan pengadilan karena keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga, sehingga pihak keluarga mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan status orang yang tidak diketahui alamat domisilinya termasuk orang-orang yang hilang/*mafqud*.

Mengenai kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan, secara garis besarnya hanya terbagi dua, yakni ahli waris yang menghibab/menghalangi/penghalang (*hajib*) dan ahli waris yang terhalang (*mahjub*) untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Terhalangnya seseorang ahli waris mendapat bagian karena adanya ahli waris yang lebih dekat.

Ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan (antara ahli waris dan pewaris), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan atau harta peninggalan. Ahli waris yang dimaksudkan adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harta peninggalan, adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi milik pewaris maupun hak-hak pewaris.

Harta warisan adalah harta bawaan dan harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya (pewaris) dan biaya proses penyelenggaraan jenazah (*tajhiz*), bersih dari utang dan wasiat atau pemberian untuk keluarga/kerabat.

B. Masalah Gono-gini

Mengenai gono-gini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ganagini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.² Gono-gini diartikan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Gono-gini dapat juga diartikan sebagai harta benda suami istri yang dibagi setelah perceraian.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I; Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 330.

Kata “gono-gini” berarti kekayaan, tetapi gono-gini pada umumnya diartikan sebagai harta bersama yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan yang tercatat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dibagi setelah perceraian. Harta bersama tersebut dapat dibagi berdasarkan asas perdamaian antara suami istri dan/atau diselesaikan di pengadilan. Khusus orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama.

Karena itu sistem pembagian harta warisan jika terjadi perceraian, harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah terlebih dahulu dibagi dua dan seperduanya menjadi tirkah untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Apabila terjadi perceraian yang ditinggal mati oleh salah satu pihak, maka pertama-tama harta tersebut dibagi dua, seperdua bagi yang ditinggal mati dan seperdua menjadi harta warisan (tirkah) untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan kadarnya masing-masing, termasuk janda atau duda. Tetapi jika terjadi perceraian hidup, maka harta yang diperoleh bersama adalah langsung dibagi dua, dan jika tidak terjadi kesepakatan kedua pihak, penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama bagi orang Islam.

Istilah gono-gini dinyatakan dalam KHI pasal 190: “bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.” Demikian juga dalam pasal 85 KHI: “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami atau istri.” Harta milik suami atau istri itu adalah disebut dengan istilah harta bawaan.

Sedangkan dalam KUHPdata pasal 119 dinyatakan: “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah dikeluarkan harta bersama atau gono-gini yakni sebanyak seperdua, dan sisanya yang seperdua itu menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah dikeluarkan biaya prosesi penyelenggaraan jenazah, utang, dan wasiat si pewaris.

C. *Bagian Ayah*

Bagian ayah dalam fikih mawaris adalah seperenam dan/atau seperenam ditambah sisa. Bagian ayah yang dimaksudkan diatur dalam QS al-Nisā’/4: 11.

... وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ

Terjemahnya:

... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak (atau cucu); dan apabila orang yang

meninggal tidak mempunyai anak (atau cucu) dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga); apabila yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam)....³

Menurut fikih mawaris, bagian ayah terdiri atas: mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila si pewaris meninggalkan anak atau cucu, dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) ditambah '*aṣabah* (sis) apabila si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu.

Adapun bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 177 ayah mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga)⁴ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan apabila si pewaris meninggalkan anak atau cucu maka ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam). Bagian ayah yang $\frac{1}{3}$ (sepertiga) inilah yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia sehingga dimasukan dalam KHI.

Sedangkan bagian ayah dalam KUHPerduta mendapatkan atau terdapat dalam golongan II (dua) pasal 854 KUHPerduta, artinya ayah mendapat bagian apabila golongan I (pertama tidak ada) yakni anak, istri dan/atau suami (pasal 852 KUHPerduta menyatakan bahwa:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta

³Lihat Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴Bagian sepertiga inilah yang menjadi hasil ijtihad para penyusun KHI.

peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Adapun pasal 852a KUHPerdara yang menjelaskan golongan I tentang anak dan keturunannya adalah:

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat

melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Bagian ayah dalam Fikih Mawaris adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) atau $\frac{1}{6}$ (seperenam) ditambah ‘aşabah (sis). Adapun bagian ayah dalam KHI dinyatakan bahwa: ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam) atau $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sedangkan bagian ayah dalam KUHPerdara adalah terdapat dalam golong II (kedua) bersama ibu, dan saudara-saudara pewaris, artinya ayah terhibab oleh golongan I (pertama) istri/janda atau suami/duda, dan anak-anak dari si pewaris.

- a. Golongan I meliputi: suami/istri yang hidup terlama, anak, keturunan anak.
- b. Golongan II meliputi: ayah dan ibu, saudara dan keturunan.
- c. Golongan III meliputi: kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas.
- d. Golongan IV meliputi: paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi

sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.⁵

D. Bagian Kakek jika Bersama Saudaranya Pewaris

Kakek jika bersama dengan saudara pewaris biasa disebut dengan istilah *al-jaddu wa al-ikhwah*. Kakek yang dimaksudkan adalah ayahnya ayah, dan dalam fikih mawaris disebut dengan istilah kakek *ṣaḥiḥ* yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Kedudukan kakek dalam fikih mawaris, ulama telah sepakat bahwa kakek menghalangi saudara seibu sebagai mana halnya ayah menghalangi saudara seibu. Karena itu kedudukan kakek hanya menggantikan ayah apabila tidak ada ayah.

Bagian kakek dalam *naṣ* tidak ditemukan secara tersurat, sedangkan bagian saudara-saudara jelas dasar hukumnya dalam QS al-Nisā'/4: 12, baik saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah maupun saudara seibu laki atau saudara perempuan seibu. Bagian kakek yang dimaksudkan adalah kakek jika bersama saudara sekandung atau seayahnya si pewaris.

Mengenai bagian kakek jika bersama dengan saudara si mati, ada dua pendapat: pertama, pendapat Abu Bakar Ash-Shiddieq, Ibnu Abbas, Abu Hanifah, mereka menyamakan kakek dengan ayah, oleh karenanya kakek menghijab saudara-saudara sekandung atau saudara seayah sebagaimana halnya ayah

⁵Effendi Perangin, *HUKUM WARIS* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 29.

menghijab segala macam saudara. Alasannya adalah kedudukan kakek dapat menggantikan kedudukan ayah, sebagaimana halnya cucu laki-laki dapat menempati kedudukan anak laki-laki. Alasan lain kakek adalah lebih utama dari saudara-saudara sebab kakek adalah ahli waris garis lurus ke atas, sedangkan saudarah adalah ahli waris garis ke samping.

Pendapat kedua dari Ali bin Abi Ṭalib, Zaid bin Šabit, Ibnu Ma'ud, Syāfi'i, Malik, Ahmad bin Hambal, mereka menyamakan kedudukan kakek dengan saudara sekandung dan/atau saudara seayah (saudaranya si pewaris) sehingga mereka mewarisi bersama. Pendapat kedua ini beralasan bahwa kakek adalah keluarga dari ayah, demikian halnya saudara-saudara tersebut adalah juga cabang dari ayah. Berdasarkan alasan ini maka kedudukan kakek sama dengan kedudukan saudara-saudara pewaris.

Alasan lain yang menyamakan kedudukan kakek dengan saudara adalah tidak adanya naş yang menyatakan bahwa kedudukan saudara-saudara sekandung atau saudara seayah terhibab oleh kakek. Kedudukan saudara-saudara tersebut sudah tersurat bagiannya dalam QS al-Nisā'/4: 12, 176.

Dari kedua pendapat tersebut, oleh Jumhur Fuqaha atau kebanyakan ulama mengikuti pendapat yang kedua, yakni menyamakan kedudukan kakek dengan saudara sekandung atau saudara seayah si pewaris. Walaupun pendapat kedua tersebut menyamakan kedudukan kakek dengan saudara-saudara sekandung atau seayah, namun ada ketentuan yang menguntungkan bagi kakek, yakni dengan menggunakan dua sistem pembagian warisan.

Pembagian ini diberikan kepada kakek yang menguntungkannya.

Kedua sistem pembagian warisan tentang bagian kakek berlaku bila terjadi kasus kewarisan yakni, jika seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris kakek dan saudara-saudara sekandung atau seayah, maka kakek selalu diberi bagian yang menguntungkan yaitu: *pertama*, kakek diberi atau memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta peninggalan atau tirkah (harta bersih). *Kedua*, kakek memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki (*muqāsamah*). *Dimuqāsamah* artinya bagian kakek sama dengan bagian saudara laki-laki atau sama dengan bagian saudara perempuan si pewaris.

Kasus *al-jaddu wa al-ikhwah* ini memang agak rumit, dan sebagai contoh dapat dikemukakan kasus. Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris kakek dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki sekandung dengan harta (tirkah) sebanyak Rp 72.000.000,00. Adapun cara penyelesaiannya adalah:

1. Kakek diberi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) maka ia mendapat
$$= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 72.000.000,00$$
$$= \text{Rp } 24.000.000,00$$
2. *Dimuqāsamah* (disamakan) maka kakek dapat
$$= \frac{1}{4} \times \text{Rp } 72.000.000,00$$
$$= \text{Rp } 18.000.000,00$$

Kasus tersebut menunjukkan bahwa apabila kekek diberi bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) maka ia mendapat Rp 24.000.000,00 tetapi bila kakek *dimuqāsamah* (disamakan) dengan

saudara-saudara si pewaris maka kakek memperoleh sebanyak Rp 18.000.000,00.

Dengan melihat kedua sistem pembagian ini, yang menguntungkan bagi kakek adalah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) yakni Rp 24.000.000,00 ketimbang *dimuqāsamah* (disamakan) yakni Rp 18.000.000,00. Oleh karena itu sistem pembagian warisan ini diberikan kepada kakek yang terbanyak atau yang menguntungkan bagi kakek.

Lain halnya kasus berikut ini, kakek lebih beruntung jika *dimuqāsamah* (disamakan) dengan saudara-saudara si pewaris ketimbang diberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari tirkah (harta warisan). Contoh kasus, seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris: kakek, seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung, dengan tirkah Rp 90.000.000,00 sehingga cara penyelesaiannya adalah:

Pertama: Apabila kakek diberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, pembagiannya adalah kakek mendapat:

$$= \frac{1}{3} \times \text{Rp } 90.000.000,00 = \text{Rp } 30.000.000,00.$$

Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapat sisa $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

$$= \text{sisa} = \frac{2}{3} \times \text{Rp } 90.000.000,00 \\ = \text{Rp } 60.000.000,00$$

Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni dua berbanding satu sehingga mendapat:

$$\begin{aligned} - \text{ untuk saudara laki-laki} &= \frac{2}{3} \times \text{Rp } 60.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 40.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 - \text{ untuk saudara perempuan} &= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 60.000.000,00 \\
 &= \text{Rp } 20.000.000,00
 \end{aligned}$$

Apabila kakek *dimuqāsamah* (disamakan) dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan maka mereka mendapat 2 : 2 : 1 = sehingga menjadi 2 + 2 + 1 = 5, artinya kakek mendapat $= \frac{2}{5} \times \text{Rp } 90.000.000,00 = \text{Rp } 36.000.000,00$

$$\begin{aligned}
 \text{Saudara laki-laki/orang} &= \frac{2}{5} \times \text{Rp } 90.000.000,00 \\
 &= \text{Rp } 36.000.000,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Saudara perempuan} &= \frac{1}{5} \times \text{Rp } 90.000.000,00 \\
 &= \text{Rp } 18.000.000,00
 \end{aligned}$$

Berdasarkan sistem penyelesaian kasus tersebut, nampaklah bahwa kakek lebih menguntungkan apabila *dimuqāsamah*, yakni dengan memperoleh bagian Rp36.000.000,00 dibandingkan bila ia diberikan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan kakek hanya memperoleh bagian sedikit yakni Rp 30.000.000,00. Oleh karena itu bagian kakek selalu diberikan yang terbanyak atau yang menguntungkan bagi kakek, yakni diberikan bagian $\frac{1}{3}$ atau *dimuqāsamah*. Kalau $\frac{1}{3}$ bagian itu menguntungkan bagi kakek maka itulah yang diberikannya. Sebaliknya kalau yang *dimuqāsamah* menguntungkan bagi kakek maka itulah yang diberikannya. Keistimewaan bagi kakek adalah diberikan bagian yang menguntungkan atau yang banyak. Alasannya adalah karena kakek sudah lanjut usia, kemungkinan besar kakek sudah tidak mampu untuk membiayai hidupnya secara maksimal.

Kasus tentang *al-jaddu wa al-ikhwah* atau kakek jika bersama dengan saudara-saudara si pewaris, hal ini tidak diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia atau

tidak diatur dalam Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu apabila terjadi kasus seperti yang disebutkan di atas (*al-jaddu wa al-ikhwah*) maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem penyelesaian kasus pada fikih mawaris, yakni dengan menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan teori *al-jaddu wa al-ikhwah* yakni diberikan kepada kakek yang menguntungkan baginya.

Adapun bagian kakek dalam KUHPdata masuk pada golongan III (ketiga) bersama dengan nenek. Dengan demikian, dalam KUHPdata kakek/nenek adalah golongan III maka yang menghibah (menghalangi) kakek/nenek adalah golongan I dan II, yaitu: golongan (I) terdiri atas: suami/istri yang hidup terlama, anak, keturunan anak. Sedangkan golongan II terdiri atas: ayah dan ibu, saudara dan keturunan.

E. *Sistem Munāsakhah dan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling pasal 841 Burgerlijk Wetboek)*

Sistem atau kasus *munāsakhah* terjadi apabila harta warisan yang ada belum sempat dibagi kepada ahli waris maka ada ahli waris yang meninggal lagi. Kasus ini juga termasuk yang rumit dalam penyelesaian kasus kewarisan karena membagi harta warisan dalam beberapa kasu secara bertingkat.

Munāsakhah terambil dari kata *nasakha* artinya menghapus, memindahkan atau mengalihkan. Oleh karena itu *munāsakhah* berarti penghapusan, pemindahan atau pengalihan sesuatu dari seseorang kepada yang lain.

Namun yang dimaksudkan *munāsakhah* dalam fikih mawaris adalah berpindahnya hak si pewaris

kepada ahli waris yang sebelum dibagi harta warisan maka terjadi lagi kematian ahli waris salah seorang atau beberapa beberapa orang sehingga terjadi kasus bertingkat-tingkat (minimal dua kali pembagian).

Kasus *munāsakhah* ini dapat dipahami dengan mengemukakan contoh, yakni seorang meninggal bernama Ali dengan meninggalkan ahli waris: istri bernama Zainab, dua orang anak laki-laki yaitu Ahmad dan Amir dan seorang cucu laki-laki yaitu Muhammad anak dari Ahmad dengan jumlah harta atau tirkah Rp 36.000.000,00. Ironisnya, sebelum harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris maka Ahmad meninggal secara mendadak. Oleh karena itu cara pembagiannya terjadi dua tahap. Tahap pertama, tirkahnya sebanyak Rp 36.000.000,00 dan ahli warisnya adalah: istri bernama Zainab, dua anak laki-laki bernama Ahmad dan Amir, cucu bernama Muhammad. Maka pembagiannya sebagai berikut:

- Istri bernama Zainab $= \frac{1}{8} \times \text{Rp } 36.000.000,00$
 $= \text{Rp } 4.500.000,00$
- Dua anak laki-laki bernama Ahmad dan Amir sebagai 'aṣabah (sis) $= \frac{7}{8} \times \text{Rp } 36.000.000,00$
 $= \text{Rp } 31.500.000,00$
- Untuk bagian Ahmad $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 31.500.000,00$
 $= \text{Rp } 15.750.000,00$
- Untuk bagian Amir $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 31.500.000,00$
 $= \text{Rp } 15.750.000,00$
- Sedangkan Muhammad (cucu) adalah mahjub hirman oleh Ahmad dan Amir.

Untuk penyelesaian tahap kedua, ahli warisnya berubah yakni: Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Ibu bernama Zainab, seorang anak laki-laki bernama Muhammad, dan seorang saudara laki-laki sekandung bernama Amir dengan harta atau tirkah sebanyak Rp 15.750.000,00 (harta dari Ahmad). Dengan demikian, penyelesaiannya tentang ahli waris dan bagian-bagiannya adalah:

- Ibu (Zainab) $= \frac{1}{6} \times \text{Rp } 15.750.000,00$
 $= \text{Rp } 2.625.000,00$
- Anak laki (Muhammad) $= \frac{5}{6} \times \text{Rp } 15.750.000,00$
 $= \text{Rp } 13.125.000,00$
- Saudara laki-laki (Amir) adalah mahjub hirman (terhalang).

Berdasarkan uraian kasus tersebut, bagian ahli waris yang bernama:

- Zainab $= \text{Rp } 4.500.000,00 + \text{Rp } 2.625.000,00$
 $= \text{Rp } 7.125.000,00$
- Amir $= \text{Rp } 15.750.000,00$
- Muhammad $= \text{Rp } 13.125.000,00$.

Kasus *munāsakhah* ini tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melainkan dikenal dengan istilah ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Apabila terjadi seperti pada kasus tersebut, seorang meninggal bernama Ali dengan meninggalkan ahli waris: istri bernama Zainab, dua orang anak laki-laki yaitu Ahmad dan Amir dan seorang cucu laki-laki yaitu Muhammad anak dari Ahmad dengan tirkah Rp 36.000.000,00. Ironisnya, sebelum harta warisan tersebut dibagi kepada ahli waris maka Ahmad meninggal lagi, maka kedudukan Ahmad

langsung digantikan oleh anaknya bernama Muhammad, sehingga cara penyelesaian kasusnya sebagai berikut:

- Istri bernama Zainab $= \frac{1}{8} \times \text{Rp } 36.000.000,00$
 $= \text{Rp } 4.500.000,00$
- Satu anak laki-laki bernama Amir dan satu cucu laki-laki bernama Muhammad anak dari Ahmad keduanya sebagai 'aşabah (sis), yakni:
 'aşabah (sis) $= \frac{7}{8} \times \text{Rp } 36.000.000,00$
 $= \text{Rp } 31.500.000,00$
- Untuk bagian Amir $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 31.500.000,00$
 $= \text{Rp } 15.750.000,00$
- Bagian Muhammad $= \frac{1}{2} \times \text{Rp } 31.500.000,00$
 $= \text{Rp } 15.750.000,00$

Kedudukan Muhammad (sebagai cucu atau anak dari Ahmad) maka Muhammad tidak dapat disebut sebagai mahjub hirman, karena Muhammad langsung menggantikan posisi ayahnya bernama Ahmad sehingga Muhammad berkedudukan sebagai anak karena menggantikan kedudukan ayahnya. Untuk menggantikan kedudukan orangtua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang ada atau ahli waris yang hidup yang sederajat dengan yang digantikan. Karena itu perlu diperhatikan ahli waris yang digantikan dan ahli waris yang menggantikan.

Ahli waris pengganti dinyatakan dalam KHI pasal 185: "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173." Pasal 173 tersebut adalah mereka yang terhalang untuk

menjadi ahli waris yang berhak menerima harta warisan yaitu:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Sedangkan dalam KUHPerdara disebutkan bahwa ahli waris pengganti disebut (*plaatsvervulling*), yakni pasal 841: “penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.” Penggantian ini terjadi dalam garis lurus ke bawah, yakni anak atau cucu dan seterusnya ke bawah.

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang masih hidup yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya, dan/atau ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikannya (pasal 185 b KHI).

F. *Pewaris tidak Mempunyai Ahli Waris*

Kasus dalam fikih mawaris tentang kewarisan bila pewaris tidak mempunyai ahli waris maka hartanya langsung ke Baitul Mal tanpa melalui proses Pengadilan Agama. Sedangkan dalam sistem hukum kewarisan Islam atau menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris maka hartanya langsung ke Baitul Mal dengan melalui Pengadilan Agama setempat. Pasal yang menyatakan tentang pewaris tidak mempunyai ahli waris (dalam KHI, pasal 191):

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

KUHPerdara dinyatakan dalam pasal 520 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris:

Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperti halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang pewarisannya ditinggalkan, adalah milik negara.

Secara umum pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris dan ia meninggalkan harta warisan, ketiga sistem pembagian harta warisan (menurut fikih mawaris, KHI, dan KUHPerdara), harta warisannya dimiliki dan dikuasai oleh negara berdasarkan putusan pengadilan.

G. Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah

Orang hamil di luar nikah lalu melahirkan anak, atau anak yang dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa didahului oleh akad nikah yang sah, anak yang lahir itu disebut anak "zina". Anak zina yang dimaksudkan adalah akibat hubungan zina maka yang menjadi malu kelak adalah anak yang sebenarnya belum ada dosanya.

Menurut fikih jika hendak melangsungkan pernikahan keluarganya maka mereka melangsungkan akad nikah setelah anak tersebut lahir dan habis masa nifasnya.

Karena itu, cara penyelesaian kasus kewarisannya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibu yang melahirkannya, dan anak itu dianggap tidak mempunyai ayah. Demikian juga anak li'an, yakni anak yang lahir dari seorang ibu/istri tetapi sang suami tidak mengakuinya karena dituduh melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain atau sang istri melakukan perbuatan zina. Jika terbukti secara hukum dan meyakinkan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan pihak ibunya saja.

1. *Orang Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah Versi KHI*

Hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengaturnya bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 bulan) masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 180 hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak tersebut saling mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya tidak perlu mengulangi akad perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di atur dalam KHI pasal 53, 99, 100, 102, dan 186.

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 102:

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 186:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Oleh karena itu, anak yang lahir akibat hubungan zina, tetapi yang mengawininya adalah laki-laki yang

bersangkutan, dan anak tersebut lahir 180 hari setelah usia perkawinan, maka anak tersebut dianggap anak yang sah dan saling merwarisi dengan kedua orangtuanya.

2. Hamil/Anak Lahir di Luar Nikah Versi KUHPer

Berdasarkan KUHPerdata pewarisan anak di luar kawin diatur dalam pasal: 251, 280-289 & 862-873.

Pasal 251:

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 280:

Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Pasal 281:

Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan

pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282:

Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun.

Pasal 283:

Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273 (anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran) mengenai anak penodaan darah.

Pasal 284:

Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada

terhadap ayahnya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285:

Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami istri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau istri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

Pasal 286:

Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam hal itu.

Pasal 287:

Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak. Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang

berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu.

Pasal 288:

Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan. Namun dalam hal itu, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah ada bukti permulaan tertulis.

Pasal 289:

Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan.

Pasal 862:

Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 863:

Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya

bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.

Pasal 864:

Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 KUHPerdara.

Pasal 865:

Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.

Pasal 866:

Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865.

Pasal 867:

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.

Pasal 868:

Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Pasal 869:

Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.

Pasal 870:

Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh keduanya.

Pasal 871:

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal ini berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.

Pasal 872:

Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Pasal 873:

Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau istri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau istri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.

H. *Anak yang Lahir Akibat Hubungan Zina Versi Yurisprudensi*

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK ini merupakan terobosan hukum yang menjelaskan hubungan antara anak di luar perkawinan dengan bapaknya. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya, termasuk kewarisan. Putusan ini memberikan hak yang sama kepada setiap anak dan dapat dibuktikan sebagai anak biologis yang dapat dibuktikan di depan pengadilan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut merupakan darah daging dari seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu yang melahirkannya.

I. *Anak dalam Kandungan*

Anak dalam kandungan jika terjadi waris-mewarisi yang disebabkan oleh meninggalnya ayah (suami). Apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri/janda yang sedang hamil, maka ahli warisnya bukan hanya seorang istri/janda, tetapi dianggap ahli warisnya adalah seorang istri/janda dan seorang anak laki-laki. Jika janda tersebut melahirkan anak laki-laki, tidak menjadi masalah, tetapi jika sang janda melahirkan anak perempuan maka harta warisannya pun tidak menjadi masalah karena telah disimpankan bagiannya yang terbanyak, yakni bagian seorang anak laki-laki. Selebihnya akan dibagi ulang sesuai dengan kadar bagiannya ahli waris tersebut jika anak yang lahir adalah perempuan. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, kasus anak dalam kandungan ini tidak diatur secara tersurat.

Status anak yang sah dalam KHI adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau anak yang sah adalah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (pasal 99 KHI). Artinya, bagian kewarisan anak dalam kandungan tidak diatur dalam KHI.

Adapun kedudukan anak dalam kandungan berdasarkan KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 2 adalah “anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.” Maksud dari kalimat tersebut bahwa status anak dalam kandungan menurut BW adalah “ada” maka ia berhak mendapat bagian dari

harta warisan orangtuanya (ayahnya) yang meninggal. Demikian pula dalam fikih mawaris, yakni bagian anak dalam kandungan disimpan bagiannya yang banyak, atau anak dalam kandungan tersebut seakan-akan anak laki-laki. Sedangkan dalam KHI bagian anak dalam kandungan tidak diatur secara tersurat, sebab yang dimaksudkan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seseorang yang telah lahir dan dinyatakan hidup. Mestinya KHI mengatur status anak dalam kandungan terhadap harta peninggalan ayahnya seperti yang tercantum dalam fikih mawaris dan KUHPerdara.

J. Aul dan Rad

Aul dan Rad dalam KHI terdapat pada pasal 192 dan pasal 193.

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya *ẓawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris *ẓawil furūd* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

Aul dan Rad dinyatakan secara jelas dalam fikih mawaris dan KHI terutama pada fikih mawaris.

Sedangkan dalam KUHPerdara aul dan rad tidak dinyatakan secara jelas.

K. *Tugas-tugas Lain Ahli Waris*

Berdasarkan pasal 175 KHI, tugas ahli waris sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pewaris, meliputi:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak menerimanya.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya pewaris.

Berdasarkan pasal 123, dan pasal 1100 sampai pasal 1111 KUHPerdara, tugas-tugas lain dari ahli waris yang intinya adalah: bahwa selain menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris juga menyelesaikan beban/tugas ahli waris seperti: membayar utang, wasiat, hibah, dan beban lainnya.

L. *Wasiat*

Wasiat merupakan suatu ucapan atau pesan seseorang atau lembaga kepada orang lain atau lembaga lain yang akan ditunaikan setelah pewasiat meninggal dunia. Dasar hukum wasiat banyak dijumpai di dalam

ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Wasiat ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam keluarga, sebab ada keluarga yang sangat berjasa kepada si pewaris tetapi ia tidak menerima warisan disebabkan terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan si pewaris.

Fikih mawaris maupun hukum kewarisan Islam di Indonesia telah mengatur tentang sistem pembagian wasiat ini dan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta atau tirkah yang ditinggalkan. Salah satu dasar hukum wasiat dalam al-Qur'an yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.⁶

Kata *ma'ruf* yang dimaksudkan ialah adil dan baik, wasiat itu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini

⁶Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, cet. II (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 27.

dinasakkan dengan ayat mawaris, dengan kata lain dinyatakan secara tersurat.

Wasiat pada dasarnya hukumnya boleh (mubah), tetapi dapat diperhatikan bahwa masalah wasiat juga masalah warisan, sehingga patut diperhatikan kondisi atau status sosial para ahli waris. Karena bagi ahli waris yang berhak menerima warisan maka ia tidak boleh untuk mendapatkan wasiat.

Menurut fikih orang Islam seharusnya berwasiat kepada orang yang dianggap berjasa pada dirinya dan orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan yang bersangkutan karena ia terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Karena hal wasiat merupakan perbuatan suci sehingga diatur dalam al-Qur'an secara jelas dan terinci.

1. Wasiat Versi KHI

Pengaturan wasiat dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) agak berbeda dengan pembagian harta warisan dalam fikih mawaris. Perbedaan tersebut adalah masalah wasiat wajib (*wasiatulwājibah*). Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 194 sampai pasal 209. Persoalan wasiat wajib adalah dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama oleh hakim karena tidak sempat dibuat wasiat saat si pewasiat masih hidup.

Wasiat wajib ini diberikan oleh hakim kepada ahli waris yang tidak mendapat harta warisan atau orang lain yang dianggap berjasa kepada si pewaris. Adapun tata cara pelaksanaan wasiat tersebut telah diatur dalam KHI buku II seperti pada pasal tersebut di atas (pasal 194-209). Pasal-pasal yang mengatur tentang wasiat dalam KHI adalah:

Pasal 194:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197:

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198:

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199:

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau

sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200:

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201:

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202:

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203:

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang

membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204:

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205:

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206:

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada,

maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207:

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208:

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pemberian wasiat wajibah bukan hanya terhadap anak angkat saja tetapi juga terhadap kerabat atau orang yang berjasa terhadap si pewaris semasa hidupnya. Wasiat wajibah diberikan oleh hakim majelis atau melalui putusan Pengadilan Agama.

2. Wasiat Versi KUHPerdato

Adapun wasiat dalam KUHPerdato diatur pada pasal 874-912.

Pasal 874

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.

Pasal 875

Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pasal 876

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang (KUHPer).

Pasal 877

Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang.

Pasal 878

Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama

yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.

Pasal 879

Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire adalah dilarang. Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.

Pasal 880

Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam undang-undang ini.

Pasal 881

Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang. Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang.

Pasal 882

Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam

hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah.

Pasal 883

Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain.

Pasal 884

Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, dianggap sebagai tidak tertulis.

Pasal 885

Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.

Pasal 886

Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut.

Pasal 887

Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat.

Pasal 888

Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau

bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.

Pasal 889

Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, telah menghalangi pemenuhan itu.

Pasal 890

Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

Pasal 891

Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal.

Pasal 892

Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.

Pasal 893

Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal.

Pasal 894

Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau

orang yang sedianya mengganti mereka itu meninggal tanpa diketahuai siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.

Pasal 895

Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.

Pasal 896

Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.

Pasal 897

Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.

Pasal 898

Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.

Pasal 899

Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.

Pasal 900

Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa

yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembaga-lembaga itu untuk menerimanya.

Pasal 901

Seorang suami atau istri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat istri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.

Pasal 902

Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau istri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku (UU) ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila yang dihibahwasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918.

Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka harga hak pakai hasil itu harus ditaksir dulu; bila harga bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hasil berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksudkan dalam alinea pertama, terserah pilihan suami atau istri

yang kemudian itu, ia boleh memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. Bila dalam hal ini, karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918. Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.

Pasal 902a

Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan istri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan.

Pasal 903

Suami atau istri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.

Pasal 904

Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan

walinya. Setelah menjadi dewasa, ia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya.

Pasal 905

Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.

Pasal 906

Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdikan agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka.

Dari ketentuan ini harus dikecualikan:

1. penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu;

2. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau istri pewaris;

3. penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.

Pasal 907

Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.

Pasal 908

Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka mereka yang terakhir ini tak akan boleh menikmati warisan lebih dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini.

Pasal 909

Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 911

Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama

seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan mereka suami atau istri.

Pasal 912

Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.

Pasal 913

Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

M. Hibah

1. Hibah Versi KHI

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah perbuatan sukarela seseorang tentang pemberian suatu benda tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kompilasi Hukum

Islam mengatur tentang hibah terdapat dalam pasal 210-214.

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

2. Hibah Versi KUHPerdata

Hibah dalam KUHPerdata pasal 1666 disebut dengan istilah penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Hibah atau penghibahan dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1666-1692.

N. Kesepakatan Ahli Waris

Pembagian harta warisan dalam fikih mawaris dibagi berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima, yakni sesuai dengan ketentuan *furūd al-muqaddarah* artinya bagian-bagian ahli waris berdasarkan kadarnya dalam nas. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya (pasal 183 KHI: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya). Hal ini didasarkan atas kesadaran dan kesepakatan bersama para ahli waris tanpa ada tekanan dan paksaan dari mana pun. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan

perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pembagian harta warisan atau kasus hukum lainnya dapat dilaksanakan kesepakatan bersama atau berdasarkan perdamaian. Kesepakatan atau perdamaian dalam KUHPerdara dinyatakan dalam pasal 1851-1864. Namun dalam fikih mawaris, harta warisan dibagi kepada ahli waris berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggolongan ahli waris dan sistem pembagian harta warisan versi fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, dan KUHPerdara mempunyai persamaan dan perbedaan. Secara garis besarnya, golongan/kelompok ahli waris persamaannya terdapat pada ahli waris yang tidak pernah mahjub hirman, sedangkan perbedaannya fikih mawaris mempunyai ahli waris yang lebih banyak daripada hukum kewarisan baik KHI maupun KUHPerdara.
2. Persamaan pada sistem pembagiannya adalah dengan menggunakan angka pecahan berdasarkan *furūd al-muqaddarah*, sedangkan perbedaannya adalah antara lain seperti yang tercantum pada tabel berikut ini, khususnya fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam.

Fikih Mawaris	Hukum Kewarisan Islam
1. Fikih mawaris adalah sebuah ilmu fikih yang berhubungan dengan pembagian harta warisan dan mengetahui tentang	Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah/harta bersih dari biaya prosesi

<p>cara perhitungan dan dapat mengetahui bagian/kadar yang wajib dari harta peninggalan sebagai milik setiap ahli waris yang berhak</p>	<p>penyelenggaraan jenazah, bayar utang, dan tunaikan wasiat) si pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing ahli waris tersebut.</p>
<p>2. Tidak ada harta bersama (tidak mengenal gonogini)</p>	<p>Ada harta bersama (ada gonogini)</p>
<p>3. Ayah mempunyai bagian: - seperenam ($\frac{1}{6}$) atau - seperenam ($\frac{1}{6}$) + 'aṣabah</p>	<p>Ayah mempunyai bagian: - seperenam ($\frac{1}{6}$) atau - sepertiga ($\frac{1}{3}$)</p>
<p>4. Sistem munāsakhah</p>	<p>Sistem ahli waris pengganti</p>
<p>5. Sistem al-jaddu wa al-ikhwah</p>	<p>Tidak mengenal</p>
<p>6. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, hartanya langsung ke baitul mal tanpa putusan Pengadilan Agama</p>	<p>Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris, hartanya langsung ke baitul mal melalui putusan Pengadilan Agama</p>
<p>7. Anak yang lahir akibat hubungan zina hanya berhak mempunyai hubungan dengan ibu kandunganya, dan ada bagian harta warisan (saling mewariskan antara ibu dan anak)</p>	<p>Anak yang lahir akibat hubungan zina berhak mempunyai hubungan dengan ibu kandunganya dan ada bagian harta warisannya, dan ada pula peluang punya hubungan dan bagiannya terhadap</p>

	ayah biologisnya termasuk saling mewarisi
8. Anak dalam kandungan ada bagiannya	Tidak diatur
9. Wasiat dan/atau wasiat wajibah dilaksanakan oleh yang membaginya tidak mesti hakim majelis	Wasiat dan/atau wasiat wajibah oleh hakim majelis (khusus wasiat wajib)
10. Harta waris dibagi berdasarkan ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerima (berdasarkan <i>furūd al-muqaddarah</i>)	Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya (dan sebaiknya dibuat kesepakatan tersebut di hadapan notaris)

Adapun sistem penggolongan dan pembagian warisan dalam KUHPerdara adalah dengan menggunakan golongan I, II, III, dan IV. Golongan pertama menghalangi golongan kedua, ketiga, dan keempat, demikian seterusnya.

B. Implikasi

1. Mengenai sistem penggolongan dan sistem pembagian warisan bagi umat Islam di Indonesia diharapkan kiranya pemerintah dan lembaga legislatif dapat melahirkan undang-

undang tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2. Lembaga eksekutif dan legislatif hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya pencari keadilan dalam bidang hukum Islam. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu kiranya pemerintah dan DPR meningkatkan status hukumnya menjadi undang-undang.
3. Saran dan masukan sangat berharga untuk lebih menyempurnakan buku ini, dan semoga Allah swt. meridainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abdurrahman H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
Edisi I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ahmad, Amrullah dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam
Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani
Press.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I,
Jakarta: Prenada Media, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.
V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi
baru revisi terjemah. Semarang: CV. Toha Putra,
1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. I; Jakarta: Balai
Pustaka, 2001.

Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta:
PT Raja Grafindo, 2000.

Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan
Asbabun Nuzul & Terjemah*. Cet. II; Jakarta:
Maghfirah Pustaka, 2009.

- Ichtijanto SA. *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: PP-IKAHA, 1994.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Aḥkām al-Mawānīs (Hukum Waris)*. Mesir: Maktabah al-Risālah al-Dauliyyah, 2001.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1922.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pusat Penelitian & Penerbitan LP2M UIN Alauddin Makassar. *Panduan Seleksi Proposal Penelitian*, 2015.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Cet. II; Bandung: 1981.
- Rahman, Jalaluddin. *Metodologi Pembaruan: Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam (Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru)*, Orasi Pengukuhan Guru Besar. Makassar: IAIN Alauddin, 2001.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- , *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama*.

-----. *Impres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

-----. *KUHPerdata*.

al-Sa'ud, Khadim al-Haramain asy-Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Raja Fahd ibn 'Abd. al-'Aziz. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah al-Munawwarah: Kementerian Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, yang menaungi Mujamma' Malik Fahd li Thiba'at al-Mush haf Asysyarif Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1418 H.

Simorangkir, J.C.T., dkk. *Kamus Hukum*. Cet. V; Jakarta: Bumi Pustaka, 1995.

Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

Supardin. *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

-----, *Manual Mutu dan Manual Prosedur Penelitian*. Makassar: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Alauddin Makassar, 2013.

Zein, Satria Effendi M. "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Kerjasama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

BIODATA PENULIS



Supardin, lahir di *Tana Luwu* (tepatnya di Batu Merah-Kota Malili, kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur), pada tanggal 2 Maret 1965 adalah alumni Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang pada bulan Mei 1991 Jurusan Peradilan Agama; lulusan Magister Hukum Islam (S2) pada UIN Alauddin Makassar pada bulan Mei 2006 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama); Doktor Hukum Islam (S3) pada UIN Alauddin Makassar pada

bulan November 2013 Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam (Peradilan Agama). Kini sebagai dosen pembina mata kuliah fiqhi/fiqhi mawaris/hukum kewarisan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, juga mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dan sebagai dosen agama pada Akademi Kebidanan Pelamonia Kodam VII Wirabuana di Makassar. Beberapa karya telah diterbitkan antara lain: Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu: Studi Kasus (penelitian 1991); Konsep Siri dalam Lontara dan Realisasinya pada Masyarakat Gowa: Studi Kasus Kawin Lari (penelitian 1998); Peluang dan Tantangan Alumni Fakultas Syari'ah (majalah Al-Marhamah Kanwil Kemenag Sulsel 2003); Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam (jurnal 2003); Ilmu Jiwa Sosial (buku 2003); Tasbih dan Jala (buku 2004); Kewarisan Bilateral Beda Agama (jurnal 2004); Syari'ah dan Lingkungan (jurnal 2004); Hukum Islam dan Sistem Hukum Internasional (jurnal 2005); Islam dan Etos Kerja (buku 2006); Hadis-hadis Jender (jurnal, 2010); Konfigurasi Hukum Islam di Indonesia (buku Maret 2011); Materi Hukum Islam (buku 2011); Lembaga Peradilan Agama & Penyatuan Atap (buku Desember 2012); Menelusuri Perkembangan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah di Indonesia (penelitian 2013); Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial (jurnal 2014); Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (buku 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020); Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (jurnal 2017); Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer (jurnal 2018); Fikih Etomologi *Inna wa Akhawātuha* dalam Memahami Ayat-ayat Hukum (jurnal 2019); *The Challenges of Islamic Law in the Industrial Revolution* = Realitas Fikih Muamalah di Era Revolusi Industri (journal 2020); *The Contestation of Values in Character Education: Political Interest and School Burden* (journal Internasional 2020); dan lain-

lain. Penulis juga aktif di sejumlah organisasi intra maupun ekstra kampus, antara lain: Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang 1988-1989; Instruktur dan Penceramah ke-100 di HMI Cabang Ujung Pandang 1987-2003; Wakil Ketua HMI IAIN Alauddin Makassar dan Gowa (2004-2005); Pendiri IPMIL (Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu) Koordinator IAIN Alauddin Ujung Pandang 1989; Penatar P4 1997; Pendiri KKL (Kerukunan Keluarga Luwu) Cabang Kabupaten Gowa 2000; Pengurus KKL'T (Kerukunan Keluarga Luwu Timur), Sekretaris KPN Al-Munawarah IAIN Alauddin 1999-2004; Komite MAN 2 Model Makassar 2011-2006; Wakil Sekjen Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni IAIN/UIN Alauddin Makassar 2005 – sekarang; Sekjen Seni Bela Diri Ikhlas Indonesia 2000-sekarang; Tim Hisab Rukyat UIN Alauddin Makassar 1994-sekarang; Ketua KMA PBS UIN Alauddin Makassar 2002; Ketua Pembangunan Masjid MAN 2 Model Makassar 2006-2007; Pengurus Dewan Masjid Indonesia Sul-Sel 2010-2015; Pengurus PUI (Persatuan Umat Islam) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris MES (Masyarakat Ekonomi Syari'ah) Sul-Sel 2008-sekarang; Sekretaris Jurusan Perbandingan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassa 2001-2006; sebagai Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakutlas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (2008-2012); Wakil sekretaris Pengurus KPPSI Kota Makassar (2013) dan menjadi Wakil Sekjen KPPSI (2013-2016); Kepala Laboratorium Falak Faklutas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2014-2015); Ketua Bidang Dakwah Masjid Kampus II UIN Alauddin Makassar dan sebagai Dewan Pembina Masjid Haji Jamaluddin Muhammad jalan Tun Abdul Razak II Hertasning Baru, Paopao Permai (2010-sekarang); Ketua Jurusan Peradilan Agama/Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan (kini menjadi Prodi Hukum Keluarga Islam); Plt. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2016-2019); Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya Cabang Kabupaten Gowa (2018-2023); Kepala Pusat Peradaban Islam Sulawesi Selatan LP2M Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019-sekarang); dan lain-lain.

DR. H. SUPARDIN, N.H.L.



FIKIH & MAWARIS HUKUM KEWARISAN

Studi Analisis Perbandingan



Penerbit
Pusaka Almaida

ISBN 978-623-226-160-0



9 786232 261600